

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1. Konsep Inisiatif Lokal

2.1.1 Pengertian Konsep Inisiatif

Secara harfiah, inisiatif adalah bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir dan harus melakukan sesuatu terhadap objek yang menjadi fokus perhatiannya, baik untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan sendiri maupun kebutuhan umum. Manifestasi inisiatif bisa terstimuli oleh ide atau gagasan, atau tindakan. Taylor (2013) yang dikutip Asih (2017) mengungkapkan bahwa “Inisiatif merupakan sikap proaktif yang menentang statusquo bukan hanya pasif menerima kondisi yang ada.” Taylor (2013) memaknai inisiatif merupakan sebuah respon spontan yang diberikan individu tanpa menunggu instruksi dari atasan dan organisasi.

Wollfock dalam Mardiyanto (2008:23) mengungkapkan bahwa “Inisiatif adalah kemampuan individu dalam menghasilkan sesuatu yang baru atau asli atau suatu pemecahan masalah.” Menurut Utami Munandar (1990:48) mengungkapkan bahwa “Inisiatif adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia, menemukan banyak kemungkinan jawaban dari suatu masalah, dimana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepatangunaan, dan keragaman jawaban.” Menurut Suryana (2006:2) mengungkapkan bahwa “Inisiatif adalah kemampuan mengembangkan ide dan caracara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan ide dan caracara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang (*thinking new things*).” Berkaitan dengan definisi beberapa ahli, maka

pengertian inisiatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya dalam usaha memecahkan suatu masalah.

Secara implisit uraian di atas menunjukkan bahwa inisiatif merupakan tindakan (*respon*) untuk mengatasi persoalan. Inisiatif berbanding lurus dengan kemampuan berpikir, pengambilan keputusan, dan keberanian mengambil risiko. Inisiatif dapat dilihat dari tindakan yang paling sederhana, seperti spontanitas individu/kelompok menutup lubang di jalan agar tidak menimbulkan kecelakaan (sebab-akibat). Inisiatif yang lebih luas akan lebih menekankan terjadinya perubahan. Pandangan Crant (2000) menyiratkan bahwa ide atau inovasi menjadi bagian penting untuk perubahan. Inisiatif dapat muncul atas ketidakpuasan terhadap kondisi kesejahteraan dan upaya termasuk hasil yang diperoleh untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Menurut pandangan Crant (2000), inisiatif (perubahan) akan mengalami banyak benturan, terutama dengan kelompok anti perubahan yang selama ini telah merasa nyaman dan menikmati kondisi diri dan lingkungan selama ini. Ciri-ciri orang yang inisiatif menurut Sund dalam Slameto (2003:147) adalah sebagai berikut:

1. Hasrat keingintahuan yang besar
2. Bersikap terbuka dalam pengalaman baru
3. Panjang akal
4. Keinginan untuk menemukan dan meneliti
5. Cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit
6. Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan

7. Memiliki dedikasi bergairah secara aktif dalam melaksanakan tugas
8. Berfikir fleksibel
9. Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban yang lebih banyak.

2.1.2 Konsep Masyarakat Lokal

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.” Masyarakat lokal adalah entitas sosial yang memiliki sistem simbolik yang rumit, termasuk bahasa, mitos, ritual, dan simbol-simbol lain yang memberi makna pada kehidupan sehari-hari mereka.

Masyarakat lokal dapat memiliki beragam karakteristik, termasuk warisan budaya yang khas, tradisi yang dilestarikan dari generasi ke generasi, sistem nilai yang berbeda, dan struktur sosial yang unik. Mereka juga dapat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan fisik tempat tinggal mereka, serta pola-pola interaksi sosial yang telah berkembang dalam komunitas mereka. Beberapa ciri khas dari konsep masyarakat lokal meliputi :

1. Warisan budaya

Masyarakat lokal sering kali memiliki warisan budaya yang khas, termasuk bahasa, adat istiadat, ritual keagamaan, seni, dan tradisi-tradisi lain yang diturunkan dari generasi ke generasi.

2. Hubungan sosial

Anggota masyarakat lokal memiliki hubungan sosial yang kuat satu sama lain, sering kali didasarkan pada ikatan keluarga, tetangga, atau keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial atau keagamaan.

3. Ketergantungan pada lingkungan

Masyarakat lokal biasanya memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan fisik tempat tinggal mereka, serta sistem pengetahuan lokal tentang ekologi dan cara berinteraksi dengan alam.

4. Ekonomi lokal

Sistem ekonomi masyarakat lokal sering kali didasarkan pada praktik-praktik pertanian, perikanan, kerajinan tangan, atau usaha-usaha kecil lainnya yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari mereka

5. Identitas kolektif

Masyarakat lokal sering mengembangkan identitas kolektif yang kuat, yang membentuk rasa solidaritas dan persatuan di antara anggotanya.

6. Pola – pola perilaku dan norma sosial

Masyarakat lokal memiliki pola perilaku, norma sosial, dan aturan-aturan yang mengatur interaksi mereka dengan anggota lain dalam masyarakat dan dengan dunia di luar.

7. Respon terhadap perubahan

Masyarakat lokal dapat merespon secara beragam terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di tingkat lokal, nasional, atau global. Ini bisa termasuk resistensi, adaptasi, atau inovasi.

Konsep masyarakat lokal menjadi penting dalam pemahaman tentang dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Melalui studi tentang masyarakat lokal, para peneliti dan praktisi dapat memahami bagaimana faktor-faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan konflik mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan identitas kelompok-kelompok manusia di tingkat lokal.

2.1.3 Konsep Inisiatif Lokal

John P. Kretzman dan John L. McKnight (1993) : Dalam bukunya “*Building Communities From The Inside Out : A Path Toward Finding And Mobilizing A Community’s Assests*”, Kretzmann dan McKnight mendefinisikan inisiatif lokal sebagai upaya yang melibatkan individu-individu, kelompok-kelompok, organisasi-orgaisasi didalam suatu komunitas untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi, menggerakkan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki kondisi dan memecahkan masalah yang relevan dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa solusi solusi untuk masalah yang dihadapi dapat ditemukan didalam masyarakat itu sendiri, bukan hanya dari luara atau dari pihak otoritas. Dengan demikian, inisiatif lokal mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan dan penerapan solusi yang relevan dengan kebutuhan dan keingin dari masyarakat setempat. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap perubahan yang terjadi dan memperkuat hubungan antar masyarakat

Hanna Leonardson dan Jean – Bosco Habyarimana : Dalam jurnal “*Local Initiatives : Factors in and Lessons For Sustainable Development*” menjelaskan

bahwa inisiatif lokal terbagi menjadi empat (4) karakteristik yang menjadikan mereka istimewa. Pertama, inisiatif lokal dapat memicu proses mengubah. Dengan inisiatif dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam konteks tertentu. Kedua, inisiatif lokal berfokus pada isu-isu tertentu dan inisiatif lokal dapat mempercepat transisi yang berkelanjutan. Sedangkan negara bangsa dan pemerintahan memulai perubahan melalui perdebatan kebijakan dan implementasi, yang seringkali memakan waktu waktu yang cukup lama, inisiatif lokal dapat bertindak lebih cepat dan, dalam banyak kasus sudah terjadi. Ketiga, inisiatif lokal menantang sistem melalui inovasi, inisiatif lokal menyoroti struktur di masyarakat yang menghambat transisi, sehingga mengidentifikasi di mana perubahan diperlukan. Perubahan yang diperlukan mungkin terkait langsung dengan inisiatif atau dapat dikaitkan dengan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk perubahan budaya. Keempat, dengan menanggapi kebutuhan masyarakat yang mendesak, inisiatif lokal bisa memicu respons adaptif terhadap krisis dan sebagainya juga memancing perubahan pada sistem secara keseluruhan.

Terdapat lima (5) faktor keberhasilan inisiatif lokal menurut Hanna Leonardson dan Jean – Bosco Habyarimana, yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Pembelajaran

Kapasitas dan pengetahuan masyarakat lokal serta kemampuan untuk belajar secara luas ditekankan sebagai hal yang penting bagi keberhasilan inisiatif lokal. Selain pembelajaran, inisiatif lokal juga bergantung pada berbagai jenis kapasitas dan sumber daya manusia di suatu daerah. Inisiatif lokal merupakan alat penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat,

dan perubahan positif di tingkat komunitas. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam prosesnya, inisiatif lokal memiliki potensial besar untuk menciptakan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Meskipun inisiatif lokal menurut definisinya berorientasi pada praktik, perlu ditekankan peran latihan dalam pembelajaran dan keberhasilan berasal dari inisiatif diri.

2. Fleksibel

Bagaimana inisiatif lokal belajar dan berkembang merupakan hal yang penting terkait dengan kebutuhan mereka untuk menjadi fleksibel dan mereka dari merubah prioritas dari waktu ke waktu. Untuk sebuah inisiatif, mereka harus mampu mengalihkan fokusnya ketika beberapa kebutuhan terpenuhi dan bermunculan kebutuhan yang baru.

3. Solidaritas

Selain memiliki kapasitas, pembelajaran, dan bersikap fleksibel, inisiatif lokal juga bergantung pada solidaritas masyarakat untuk mencapai keberhasilan. Solidaritas dalam suatu inisiatif disorot karena inisiatif lokal bertujuan untuk memberikan dan membenahi untuk lebih baik bagi komunitas mereka.

4. Dukungan

Beberapa faktor sebagai besar terkait dengan faktor internal, namun keberhasilan inisiatif lokal juga tidak lepas dari eksternal. Faktor dukungan dan akses merupakan faktor penting dalam keberhasilan inisiatif lokal. Salah satu aspek penting adalah kebijakan publik yang mendukung seperti peraturan yang mengakui inisiatif lokal.

5. Jaringan

Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya dalam faktor keberhasilan inisiatif lokal adalah jaringan. Jaringan menjadi faktor bagaimana inisiatif lokal dipertahankan dan ditingkatkan skalanya. Inisiatif lokal menggunakan cara dan jenis jaringan yang berbeda untuk mencapai keberhasilan aktivitas mereka. Jaringan antara aktor aktor serupa sebagai lintas inisiatif, penyebaran kegiatan, dan peningkatan dampaknya.

2.2. Konsep Kesiapsiagaan

2.2.1 Pengertian Kesiapsiagaan

Sutton dan Tierney dalam (Dodon, 2013) menyatakan bahwa “Kesiapsiagaan merupakan tindakan perlindungan aktif yang dilaksanakan sebelum dan saat terjadinya bencana.” Carter (1991) yang dikutip LIPI-UNESCO/ISDR (2006) mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai serangkaian tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, individu untuk merespon situasi bencana dengan cepat dan efektif guna mengurangi risiko bencana seperti korban jiwa dan harta benda.

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen bencana yang diartikan sebagai kesiapan masyarakat di semua lapisan untuk mengenali ancaman yang ada di sekitarnya serta mempunyai mekanisme dan cara untuk menghadapi bencana. Kesiapsiagaan dilakukan pada tahapan pra bencana yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk secara efektif mampu mengelola segala macam keadaan kedaruratan dan menjembatani masa transisi dari respon ke pemulihan yang berkelanjutan. Peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana

yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya suatu bencana. Maka dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan bencana adalah populasi-populasi rentan, dan merespon serta mengatasi secara efektif konsekuensi bencana.

2.2.2 Aspek-Aspek Kesiapsiagaan

Adapun aspek aspek kesiapsiagaan dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi masing-masing yang dibutuhkan. Aspek kesiapsiagaan menurut LIPI – UNESCO/ISDR (2006) terdapat lima (5) aspek kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana diantaranya adalah :

1. Pengetahuan dan Sikap

Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana adalah aspek pertama untuk mengetahui tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang bencana akan mengetahui risiko yang akan dihadapi. Pengetahuan lebih banyak untuk mengukur pengetahuan dasar mengenai bencana alam seperti cirri-ciri, gejala dan penyebabnya. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi sikap dan kepedulian untuk siap dan siaga mengantisipasi bencana.

2. Kebijakan dan Panduan

Kebijakan merupakan upaya konkret untuk melaksanakan kegiatan siaga bencana. Kebijakan dan panduan yang berpengaruh terhadap kesiapsiagaan meliputi pendidikan public, emergency planning, system peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya, termasuk pendanaan, organisasi pengelola, SDM dan fasilitas penting untuk koordinasi darurat bencana. Pemerintah dalam hal ini harus memiliki kebijakan tentang kesiapsiagaan bencana.

3. Rencana Tanggap Darurat

Perencanaan kedaruratan lebih ingin mengetahui mengenai tindakan apa yang telah dipersiapkan menghadapi bencana alam. Rencana darurat terkait dengan evaluasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Masyarakat yang mengetahui tentang risiko bencana akan melakukan rencana tanggap darurat jika terjadi bencana.

4. Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan di sini adalah upaya yang terdapat di masyarakat dalam mencegah korban akibat bencana dengan cara tanda-tanda peringatan yang ada. Sistem peringatan meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana.

5. Kemampuan Mobilisasi Sumber Daya

Kemampuan untuk memobilisasi sumberdaya adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya dengan tepat jika terjadi bencana. Mobilisasi sumberdaya lebih kepada potensi dan peningkatan sumber daya di masyarakat seperti melalui keterampilan yang diikuti, dana, prasarana dan sarana lainnya.

2.2.3 Tujuan Kesiapsiagaan

Greg dalam (Dodon, 2013) menjelaskan bahwa kesiapsiagaan memiliki tujuan guna meminimalisir efek samping yang berbahaya dengan tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, serta efisien untuk tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Tujuan kesiapsiagaan dalam IDEP (2007) yaitu sebagai berikut :

1. Meminimalisir Ancaman

Meminimalisir ancaman merupakan sebuah bentuk pencegahan ancaman. Pencegahan ancaman tidak mungkin dapat dilakukan secara keseluruhan, namun dengan meminimalisir ancaman dengan beberapa tindakan merupakan cara yang efektif dalam kesiapsiagaan bencana.

2. Meminimalisir Kerentanan Masyarakat

Meminimalisir kerentanan masyarakat akan lebih mudah jika masyarakat telah mempersiapkan diri. Masyarakat yang pernah mengalami bencana sebelumnya dapat mempersiapkan diri melalui tindakan kesiapsiagaan, misalnya melakukan perencanaan penyelamatan, evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.

3. Meminimalisir Akibat

Meminimalisir akibat merupakan hal yang penting untuk diterapkan. Hal demikian disebabkan adanya masalah umum yang terjadi saat adanya bencana seperti kurang tersedianya air bersih sehingga dapat menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit menular. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan dapat diminimalisir oleh masyarakat dengan cara menambah kesadaran akan pentingnya gerakan meminimalisir akibat.

4. Menjalin Kerjasama

Menjalin kerjasama merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Masyarakat dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak kepolisian, aparat kecamatan atau desa, puskesmas dan lembaga lainnya guna mempermudah segala proses yang akan dilakukan ketika terjadi suatu bencana.

2.3. Konsep Kampung Siaga Bencana (KSB)

2.3.1 Pengertian Kampung Siaga Bencana

Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 tahun 2011 menjelaskan bahwa “Kampung Siaga Bencana atau yang biasa disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana.” KSB dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Menurut bentuknya, kegiatan KSB dapat dibedakan menjadi dua yakni kegiatan fisik seperti membangun tanggul, membuat gorong-gorong, membuat jalur evakuasi, penghijauan wilayah hutan gundul serta pembersihan parit untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Kegiatan non fisik dapat dicontohkan seperti pelatihan dan simulasi/gladi penanggulangan bencana atau memberikan masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana. Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko bencana yang ada pada masyarakat. Sebaiknya kegiatan seperti telah disebutkan diatas mendapatkan dukungan masyarakat sehingga keberlangsungannya dapat dipertahankan. (Petunjuk Teknis Kampung Siaga Bencana 2011).

2.3.2 Tujuan Kampung Siaga Bencana

Pembentukan Kampung Siaga Bencana sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 mempunyai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana.
2. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat.
3. Mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana.
4. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan
5. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana

2.3.3 Prinsip – prinsip Kampung Siaga Bencana

Dalam pelaksanaannya, Kampung Siaga Bencana (KSB) mempunyai beberapa prinsip. Adapun prinsip-prinsip KSB adalah sebagai berikut :

1. Kesukarelaan

Tim KSB dalam menjalankan programnya bersifat sukarela, bertujuan semata untuk kemanusiaan dan tidak berafiliasi dengan kegiatan politik tertentu. KSB memanfaatkan swadaya masyarakat dengan mengoptimalkan SDA dan SDM yang ada di wilayah tersebut. Anggota KSB tergabung secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan.

2. Kerja sama

Kegiatan yang ada dalam KSB baik bersifat ke dalam dan keluar yang dilaksanakan sebelum, pada saat, dan paska bencana mengedepankan kerja sama dan keterpaduan.

3. Akuntabilitas

Kegiatan KSB baik sebelum, pada saat, dan sesudah bencana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

4. Partisipasi

Kegiatan KSB melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada pada daerah tersebut.

5. Menghormati dan menghargai nilai-nilai lokal

Kegiatan penanggulangan bencana menghargai nilai-nilai setempat yang telah berlaku dalam menanggulangi masalah kebencanaan.

6. Kemandirian

Kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat Tim KSB mengedepankan kemandirian masyarakat.

2.3.4 Landasan hukum Kampung Siaga Bencana

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana

2.3.5 Sumber pendanaan Kampung Siaga Bencana

Petunjuk Teknis KSB Tahun 2011 menyebutkan bahwa pendanaan dalam rangka pembentukan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pemerintah

- a. Pembentukan oleh pemerintah atau dalam hal ini oleh Kementerian Sosial melalui dana dekonsentrasi diberikan dana melalui APBN
- b. Pemerintah daerah provinsi dapat membentuk dengan menggunakan dana APBD I
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk dengan menggunakan dana APBD II

2. Masyarakat

Pembentukan oleh masyarakat dapat menggunakan dana masyarakat dengan ketentuan tetap mengacu pada mekanisme pembentukan yang telah diatur oleh peraturan Menteri Sosial RI.

2.3.6 Kegiatan Kampung Siaga Bencana

Kegiatan KSB sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis KSB Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Bencana

Kegiatan sebelum bencana berfokus pada pengenalan potensi dan sumberdaya yang ada pada masyarakat, ancaman dan risiko bencana yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa bencana serta mempersiapkan masyarakat sewaktu-waktu terjadi bencana (kesiapsiagaan). Kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana

sangat penting dilakukan, mengingat bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa tahu waktunya.

a. Merencanakan kegiatan sebelum bencana dengan memperkirakan risiko bencana dengan langkah-langkah seperti berikut:

1) Pembuatan profil desa yang meliputi :

- a) Luas dan batas wilayah, jumlah dan nama-nama wilayah, sarana jalan (kabupaten, Jalan Desa, Jalan Dusun, jalan Kampung) jembatan
- b) Tata guna lahan (hutan, sawah, permukiman, mata air, sungai, laut sesuai dengan kondisi setempat)
- c) Sarana-sarana umum (balai desa atau kelurahan, sekolah, pasar, tempat ibadah, puskesmas, atau klinik dsb)
- d) Jumlah masyarakat berdasarkan umur dan jenis kelamin, pekerjaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

2) Penilaian Ancaman

- a) Jenis ancaman
- b) Penyebab
- c) Tanda awal
- d) Perkiraan kekuatan, kecepatan, frekuensi dan luas wilayah terkena
- e) Perkiraan waktu kedatangan/timbulnya ancaman
- f) Dampak yang merugikan

3) Penilaian kerentanan dan kemampuan

Tujuan kegiatan ini agar masyarakat, mengetahui kekuatan dan kerentanan. Untuk menilai kerentanan masyarakat kita dapat

menggunakan sumber penghidupan, jika positif disebut kemampuan dan jika negatif disebut kerentanan. Sumber penghidupan tersebut adalah:

- a) Alam (tanah, air, udara, tumbuhan, binatang)
- b) Manusia (sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, jenis kelamin, usia, kelengkapan anggota badan, fungsi alat indera)
- c) Sosial (hubungan keluarga, organisasi, kelembagaan, jaringan sosial)
- d) Ekonomi (mata pencaharian, keuangan, akses pinjaman)
- e) Fisik (jalan, jembatan, puskesmas, pelabuhan, bandara, terminal angkutan, sekolah, pasar, KUD, tempat pelelangan ikan, rumah gadai, tempat ibadah, sarana rekreasi, perkantoran, pertokoan)

4) Penilaian risiko

Adalah proses memperkirakan besarnya risiko kemungkinan bencana.

Adapun komponen dalam penilaian risiko, yaitu :

- a) Menghitung kemungkinan risiko
- b) Mengkaji kemungkinan dampak tiap ancaman
- c) Mempertimbangkan situasi wilayah (desa, kota, pantai atau pegunungan)
- d) Mengkaji unsur fisik, bahan, sosial, sifat setiap unsur berisiko yang membuatnya rentan terhadap ancaman

b. Mempersiapkan pembagian tugas/seksi Tim Kampung Siaga Bencana

Mempersiapkan dan menyusun Tim KSB dalam bentuk seksi/tugas per kelompok. Nama tiap-tiap kelompok disesuaikan dengan tugas yang akan dilaksanakan. Seperti Tim Peringatan Dini, Tim Evakuasi, Tim Komunikasi, Tim

Pengungsian dll. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar dan mempertegas tugas dan tanggung jawab. Sehingga apabila terjadi bencana masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan dan dengan siapa mereka harus bekerja sama serta kapan waktunya.

c. Menyusun dan melaksanakan gladi/simulasi penanggulangan bencana

Kegiatan gladi/simulasi di KSB dimaksudkan untuk menguji pengetahuan dan keterampilan yang telah disusun antara Tim KSB bersama masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

d. Menyusun Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus semaksimal mungkin melibatkan seluruh unsur perwakilan masyarakat. SOP menggambarkan bagaimana masyarakat melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Penyusunan SOP menyesuaikan dengan kondisi kerawanan bencana yang ada pada daerah masing-masing. SOP harus mencakup beberapa aspek penting kondisi daerah seperti:

- 1) Kerawanan bencana
- 2) Pembagian tugas yang terdiri dari seksi-seksi
- 3) Menyusun jalur evakuasi
- 4) Metode Evakuasi masyarakat pada saat ada potensi bencana dan saat bencana
- 5) Metode penanganan korban bencana yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial (kelompok rentan) seperti ibu hamil, anak-anak, penyandang cacat dan lansia.
- 6) Pendirian tenda dan atau shelter

- 7) Pendirian Dapur Umum Lapangan
- 8) Lokasi Pusat Kendali Lapangan
- 9) Pengujian SOP

SOP berlaku dalam jangka tertentu, karena alasan perkembangan sosial, budaya, politik dan lingkungan maka SOP dapat dirubah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan situasi yang ada pada KSB.

2. Pada Saat Bencana

Pada saat terjadi bencana tindakan Tim KSB berfokus pada pemberian pertolongan langsung kepada korban bencana yaitu mempraktekkan apa yang sudah disusun sebelum bencana. Ketua Tim KSB memutuskan apakah warga desa mengungsi atau tidak dan kemudian apabila meminta pertolongan siapa yang harus dihubungi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat terjadi bencana oleh Tim KSB meliputi antara lain:

a. Mempersiapkan tugas setiap seksi (tim).

Untuk pembentukan seksi/bagian paling tidak terdapat beberapa bagian seksi yaitu:

- 1) bagian evakuasi;
- 2) bagian dapur umum;
- 3) bagian logistik;
- 4) bagian hunian sementara;
- 5) Bagian komunikasi Pembagian seksi/bagian ini dapat diperluas dengan mempertimbangkan situasi dan kompleksitas masalah yang ada di lapangan.

b. Membantu menangani korban bencana

Membantu menangani korban bencana seperti mempersiapkan dan atau mendirikan tenda, dapur umum umum lapangan, pos komunikasi terpadu, mengurus jenazah, menolong orang yang mengalami gangguan jiwa. Terkait tempat pengelolaan pengungsian hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a) Lokasi pengungsian harus aman dari berbagai ancaman bencana dan binatang buas.
- b) Pembagian tanggung jawab dan tugas didalam pos (tenda) yang dikoordinasikan oleh Tim KSB.

c. Membuat laporan kondisi bencana dan korban bencana

Membuat laporan kondisi bencana dan korban bencana kepada Pemerintah Daerah setempat (Dinas Sosial/Institusi Sosial, BPPD) Laporan disampaikan kepada: Dinas Sosial/Institusi Sosial Kabupaten yang ditembuskan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian saat terjadi bencana:

- 1) Penanganan Korban Bencana Pada saat terjadi bencana korban bencana diidentifikasi berdasarkan kondisinya dan dicatat identitasnya, yaitu untuk menentukan pemberian Pertolongan Pertama:

a) KR = Kritis

Perawatan Langsung. Korban kritis diutamakan dan secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat.

b) DR= Darurat Perawatan Segera.

Korban yang darurat segera diberi bantuan untuk meringankan penderitaan dan secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat.

c) NK= Non-Kritis

Bisa menunggu perawatan. Korban yang tidak kritis sebaiknya ditempatkan ditempat terlindung dan diberikan pertolongan pertama.

d) TH= Tanpa Harapan

Meninggal atau tidak bisa dirawat. Korban yang tanpa harapan ditempatkan dilokasi khusus

2) Penanganan Jenazah

Penanganan korban yang meninggal sebisa mungkin harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di daerah setempat seperti berdasarkan keyakinan atau agama. Akan tetapi, akan lebih baik lagi apabila mengikuti standar penatalaksanaan korban bencana yang ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan Disaster Victim Identification (DVI).

3) Mendirikan Tenda atau *Shelter*

Pendirian tenda atau shelter harus mengikuti prosedur untuk keamanan dan kenyamanan pengungs. Dalam pendirian tenda atau shelter perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut:

a) Aman dari ancaman bencana dan binatang buas

b) Tempat datar dan tidak bergelombang

c) Cukup luas untuk menampung pengungsi

d) Dekat dengan akses jalan dan mudah dijangkau

e) Air bersih dan sanitasi lingkungan

4) Pencarian Orang Hilang

Pada saat kondisi bencana, kemungkinan akan ada anggota keluarga yang hilang, untuk itu perlu disiapkan formulir pencarian orang hilang.

5) Pendampingan Terhadap Kelompok Rentan

Untuk kelompok Rentan seperti Anak-anak usia dibawah 5 tahun ke bawah, Perempuan Hamil, Perempuan Menyusui, Orang Penyandang Cacat, Orang Lanjut Usia, Orang Sakit mungkin memerlukan transportasi khusus atau obat.

3. Pasca Bencana

Pasca bencana berkaitan erat dengan kegiatan pemulihan. Selama masa pemulihan, sebaiknya Pengurus dan Anggota KSB secara rutin mengadakan pertemuan dengan anggota masyarakat lainnya untuk mengetahui kebutuhan dan cara pemulihan terhadap dampak bencana. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan antara Tim KSB dan Anggota masyarakat yang terkena bencana tentang bagaimana masa pemulihan untuk lingkungannya. Apakah perlu adanya dibentuk Tim/Seksi untuk membuat analisa kebutuhan. Sebelum meminta bantuan dari pihak luar Tim KSB dapat mengidentifikasi sumberdaya lokal yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana seperti:

- a. Sumber daya alam (mata air bersih)
- b. Peralatan PB yang masih dapat dipergunakan kemudian apabila terjadi bencana
- c. Uang Kas yang dimiliki Tim KSB
- d. Bahan Bangunan yang masih bisa dipergunakan

- e. Makanan yang bersifat lokal (sagu, lauk pauk, singkong, gaplek, ubi, dan nasi jagung dll)
- f. Tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana
- g. Bangunan untuk perlindungan sementara

Untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana, Tim KSB dapat meminta bantuan dari Pemerintah, Masyarakat Peduli Bencana, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan atau Masyarakat lainnya.

Disamping kerusakan bangunan dan infrastruktur penting lainnya, bencana membawa dampak psikologis bagi korban bencana sehingga ada masyarakat yang mengalami gangguan psikologis seperti stress dan depresi. Untuk itu Tim KSB dapat meminta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat atau tim ahli (psikososial) yang ada pada Pemerintah guna memberikan bantuan seperlunya sehingga kesejahteraan psikososial korban bencana dapat dipenuhi.

Pada tahap pascabencana penting untuk membuat analisa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana seperti:

- a. Tempat tinggal atau beratap (setiap orang membutuhkan tempat berteduh)
- b. Air bersih untuk minum dan mencuci lainnya
- c. Penyimpanan bantuan (Lumbung Sosial Penanggulangan Bencana)
- d. Kebutuhan rasa aman
- e. Penerangan (Listrik)
- f. Konsultasi kejiwaan (psikolog , pekerja sosial,ustadz, pendeta, dll

2.4. Konsep Bencana Banjir

2.4.1 Pengertian Banjir

World Health Organization (WHO, 2002) menjelaskan bahwa “Bencana merupakan suatu kejadian yang mengganggu kondisi normal dan mengakibatkan tingkat penderitaan yang melebihi kemampuan komunitas yang terkena untuk mengatasinya.” Bencana itu sendiri merupakan kerusakan serius pada fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sebuah komunitas dan lingkungan yang menyebabkan penyebaran kerusakan secara luas terhadap manusia, materi, ekonomi dan lingkungan yang merujuk pada kemampuan komunitas untuk menanggulangi hal tersebut dengan sumber-sumber penghasilan yang masih tersisa. Kerusakan serius pada fungsi-fungsi ini berpengaruh tidak hanya pada individu namun juga populasi manusia yang ada.

Departemen Kesehatan RI menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan biasa dari pihak luar.

Banjir dalam artian umum adalah debit air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air sungai secara relative lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alir sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah

hingga cekung, selain itu, terjadi banjir juga dapat disebabkan oleh lapisan air permukaan yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran *drainase* atau sistem aliran sungai.

2.4.2 Jenis – jenis Bencana Banjir

Bencana banjir terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun macam – macam bencana banjir yaitu sebagai berikut :

1. Banjir Air

Merupakan banjir yang sering terjadi. Penyebab banjir air dikarenakan meluapnya air di danau, sungai,selokan, atau aliran air yang lainnya sehingga menyebabkan air tersebut naik dan menggenangi daratan. Biasanya banjir air disebabkan karena hujan yang terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan aliran air tersebut tidak dapat menampung air yang berlebihan.

2. Banjir Bandang.

Pengertian banjir bandang merupakan banjir yang mengangkut air dan juga lumpur. Banjir bandang tersebut sangatlah berbahaya dibandingkan dengan banjir air biasa, hal ini karena akan sulit untuk menyelamatkan diri. Banjir bandang dapat menghanyutkan benda-benda dan memiliki daya rusak yang tinggi. Banjir bandang pada umumnya terjadi di area pegunungan yang tanah pegunungan tersebut seolah longsor karena adanya air hujan yang ikut terbawa air ke daratan yang lebih rendah. Biasanya banjir tersebut dapat menghayutkan pohon yang berukuran besar sehingga dapat merusak pemukiman warga yang terkena banjir baandang tersebut.

3. Banjir Lumpur

Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip bandang namun lumpur tersebut keluar dari dalam bumi sehingga dapat menggenangi daratan. Lumpur tersebut terkadang memiliki kandungan bahan serta gas kimia berbahaya.

4. Banjir Rob (Laut Pasang)

Pengertian banjir rob merupakan banjir yang disebabkan karena pasang air laut. Pasang air laut pada umumnya akan menahan air sungai yang menumpuk, sehingga dapat menjebol sebuah tanggul dan menggenangi daratan.

5. Banjir Cileunang

Banjir cileunang merupakan suatu banjir yang mirip dengan banjir air akan tetapi banjir tersebut dikarenakan hujan yang sangatlah deras dan mempunyai debit air yang banyak. Terjadinya banjir ini sangatlah cepat, hal ini karena hujan yang terjadi sangatlah deras sehingga dapat terjadi dalam waktu cepat.

6. Banjir Lahar

ialah banjir yang disebabkan karena lahar gunung-gunung berapi yang disebabkan karena lahar gunung berapi masih aktif saat yang meletus atau mengalami erupsi. Dari proses erupsi tersebut, gunung akan mengeluarkan lahar dingin yang dapat menyebar ke lingkungan di sekitarnya. Air yang ada dalam pendangkalan sehingga berdampak terkena banjir.

2.5. Konsep Penanggulangan Bencana

2.5.1 Pengertian Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 128 tahun 2011 yaitu keseluruhan aspek perencanaan kebijakan pembangunan yang beresiko

bencana yang meliputi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup kegiatan sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana yang terdiri dari pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kembali kondisi yang lebih baik sebagai akibat dampak bencana.

Rohmat (2006) menyatakan bahwa “Penanggulangan bencana adalah salah satu wujud dari upaya untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, hasil pembangunan, alam dan isinya di seluruh wilayah.” Penanggulangan bencana merupakan kewajiban bersama bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang didasarkan pada partisipasi dan peran aktif mereka. Penanggulangan bencana juga bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan mengurangi penderitaan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan.

2.5.2 Tujuan Penanggulangan Bencana

Adapun tujuan dari penanggulangan bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
 3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 4. Menghargai budaya lokal;
 5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
- dan

7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.5.3 Asas dan prinsip Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, penanggulangan bencana berasaskan pada asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi.

2.6. Konsep Pekerjaan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana

Definisi pekerjaan sosial menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) adalah kegiatan profesional membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan ini.

Pekerjaan Sosial dalam Penanggulangan bencana merupakan serangkaian tindakan profesional pekerjaan sosial yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana pada individu, keluarga, organisasi maupun komunitas. Praktik ini disebut sebagai tindakan profesional karena menggunakan teknologi yang dibangun dengan landasan teoritik tentang dan perubahan dalam hubungan antar manusia dan perilakunya di lingkungan sosial. Selain itu pekerjaan sosial dalam penanggulangan

bencana juga bergerak dalam suatu kerangka model praktik dan didorong oleh ideologi serta dalam batasan nilai serta etika pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial dalam Penanggulangan Bencana juga dirancang dengan berkesadaran yaitu terencana, bertujuan dan dapat diaudit.

Menurut Tukino (2013) pekerja sosial dalam *setting* bencana dapat berperan ke dalam 3 tahapan penanggulangan bencana yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Bencana

Pekerja sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengurangan risiko bencana, terutama dalam hal :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberian informasi terkait bahaya, kerawanan, dan risiko bencana.
- b. Pemetaan kapasitas masyarakat dalam pencegahan bencana dan pengurangan risiko bencana.
- c. Bersama masyarakat membangun sistem penanggulangan bencana yang berkesinambungan pada tingkat lokal.
- d. Pekerja sosial juga dapat melakukan advokasi kepada para pihak yang bertujuan agar terjadi perubahan pada tatanan kebijakan dan perencanaan dalam penanggulangan bencana.

2. Tahap Saat Terjadi Bencana

Pekerja sosial mempunyai peran penting dalam membantu korban bencana dan pengungsi terutama dalam hal berikut :

- a. Penanganan terhadap korban bencana yang mengalami trauma, dapat ditempuh dengan mendirikan pusat-pusat pelayanan berupa “*Resilience Development Projects*” yang lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip pekerjaan sosial.
- b. Penanganan terhadap kelompok rentan dengan memberikan perlindungan khusus agar mereka tidak semakin parah dalam situasi pengungsian.
- c. Penanganan terhadap masalah pendidikan anak; dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah sebagai pengganti atau menunggu perbaikan yang mengalami kerusakan agar dapat digunakan
- d. Penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan struktur keluarga yang mengalami kerusakan, hilangnya dukungan sosial, perna sosial, serta ketidakpastian dapat dilakukan melalui restorasi fungsi-fungsi tersebut.

3. Tahap Pasca Bencana

Pekerja sosial berperan penting dalam membantu korban bencana/pengungsi, terutama dalam hal berikut :

- a. Pembentukan atau pengembangan forum warga/keluarga penungsi korban bencana alam.
- b. Pelatihan-pelatihan dalam penanganan masalah. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para korban bencana didaerah pasca bencana.
- c. Pelatihan keterampilan usaha, pemberian bantuan modal usaha, dan pendampingan dalam pengembangan usaha.

2.7. Konsep Peningkatan Kapasitas

Capacity building adalah proses yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu, kelompok, atau organisasi. Ini melibatkan pengembangan

ketrampilan , peningkatan potensi, dan penguasaan kompetensi agar mereka dapat bertahan serta mengatasi tantangan dari perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga. Capacity building juga dapat dianggap sebagai upaya kreatif dalam membangun kapasitas yang sebelumnya belum terlihat atau dikenali.

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut Milen (2004 : 16) yaitu:

Pengembangan kapasitas adalah suatu proses yang berkelanjutan dalam meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau institusi. Proses ini tidak berhenti pada satu titik, tetapi berlangsung terus menerus. Meskipun demikian, untuk mempercepat proses ini, bantuan dari luar seperti dari pihak donor dapat membantu dalam mengoptimalkan fungsi dan percepatan pengembangan kapasitas tersebut.

Menurut Daniel Ricket dalam Hardjanto (2006 : 67) menyebutkan “*The ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission.*” Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah:

1. Mempercepat implementasi desentralisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Memantau dengan proporsional mengenai tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah.
3. Menggalang sumber dana dari pemerintah daerah dan pihak lain.
4. Menggunakan dana dengan cara efektif dan efisien.

Menurut Riyadi (2003) dalam sebuah artikel secara khusus menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu:

1. Komitmen bersama (*collective commitments*)

Menurut Milen (2004 : 17), memperkuat kapasitas membutuhkan waktu yang panjang dan memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Dalam pengembangan kapasitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, komitmen kolektif merupakan aset fundamental yang harus terus-menerus ditanamkan dan dijaga dengan baik. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada pemegang kekuasaan, tetapi mencakup semua elemen dalam organisasi tersebut. Pengaruh dari komitmen bersama ini sangat signifikan, karena menjadi dasar bagi semua rencana kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama.

2. Kepemimpinan yang kondusif (*condusiv leadership*)

Kepemimpinan dinamis yang memberikan kesempatan luas bagi semua elemen dalam organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya merupakan faktor kunci. Dengan gaya kepemimpinan yang kondusif seperti ini, akan menjadi dorongan bagi setiap individu dalam organisasi untuk meningkatkan kemampuannya.

3. Reformasi Peraturan

Dalam sebuah organisasi, penting untuk menetapkan peraturan yang mendukung pembangunan kapasitas dan diterapkan secara konsisten. Salah satu contohnya adalah peraturan terkait dengan sistem penghargaan dan hukuman, yang berperan penting dalam mendorong kelancaran pembangunan kapasitas..

4. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada dasarnya mengacu pada aspek struktural dan budaya. Ini mengindikasikan pentingnya adopsi budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas. Kedua aspek ini harus dikelola dengan baik dan menjadi kondisi yang mendukung dalam mendukung program pengembangan kapasitas. Contohnya, dengan menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan sesama karyawan atau antara karyawan dengan atasan mereka.

5. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki

Mengenali kekuatan dan kelemahan adalah langkah penting untuk merancang program pengembangan kapasitas yang efektif. Dengan mengakui kelemahan dan kekuatan yang ada, baik dari individu maupun lembaga, organisasi dapat dengan cepat memperbaiki kelemahan dan menjaga serta mengembangkan kekuatan yang dimiliki.